

Fenomena Dan Indikasi Patronase Dan Klientelisme Pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

*Ardi Yanto*¹

¹⁾ Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Indonesia

¹ E-mail: masardy17@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received: October 20, 2022

Revised: October 25, 2022

Accepted: November, 25, 2022

Available online: December 31, 2022

KEYWORDS

Patronage, clientelism, elections

ABSTRAK

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020. Pilkada tersebut akan diikuti oleh Petahana dan Wakil Petahana yang membentuk poros baru dan juga tokoh-tokoh yang mempunyai latarbelakang yang berbeda-beda diantaranya Birokrat, Pengusaha, Tokoh Masyarakat, Tokoh Politik Senior, dan Notaris. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana fenomena dan indikasi Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa fenomena dan indikasi Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi tiga pendekatan, 1). Pendekatan Kulturalis, yaitu Pendekatan melalui ketua-ketua adat, 2). Pendekatan Marketis, yaitu pendekatan dilakukan dengan menawarkan program-program ke masyarakat secara luas dan efektif, 3). Pendekatan Institusionalis, yaitu Pendekatan dilakukan kepada organisasi-organisasi masyarakat.

ABSTRACT

Pesisir Barat district is one of the areas that will hold the elections on 23 September 2020. The elections will be followed by the incumbent and the deputy officer who formed the new axis as well as the characters who have different backgrounds including bureaucrats, entrepreneurs, public figures, Senior political figures, and notary. The purpose of this research is to know how the phenomenon and indications of patronage and clientelism at the Pesisir Barat district elections of year 2020. The results of this study explain that the phenomenon and indications of patronage and clientelism at the Pesisir Barat district elections are divided into three approaches, 1). Kulturalis approach, which is approach through indigenous leaders, 2). Marketis approach, which is the approach is done by offering programs to the community widely and effectively, 3). The institutionalist approach, the approach is done to the community organizations.

This is an open access article under the
 CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan di selenggarakan pada 9 Desember 2020,

secara nasional dan serentak akan di selenggarakan oleh 270 Daerah Kabupaten/Kota. Provinsi Lampung

Doi: <https://doi.org/10.31186/JGOAP>.

Available at : <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jgoap/index>

merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada secara serentak tahun 2020, adapun daerah yang menyelenggarakannya yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat.

Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2020 akan melaksanakan Pilkada untuk periode kedua semenjak pesisir barat dibentuk pada tahun 2012, periode pertama dilakukan pada tahun 2016 yang diikuti oleh 4 pasangan calon yaitu Agus Istiqlal-Erlina, Aria Lukita Budiwan-Evan Tolani, Oking Ganda Miharja-Irawan Topani, dan Jamal Naser-Sarial. Pada pilkada 2016 dimenangkan oleh pasangan Agus Istiqlal-Erlina dengan dukungan 3 Partai Politik yaitu Nadem, PKB, dan PAN. Saat ini menghadapi Pilkada tahun 2020 terbentuk poros baru, pertarungan Partai Politik Kabupaten Pesisir Barat akan terbentuk hal ini ditandai dengan kembali majunya calon petahana Agus Istiqlal menjadi bakal calon Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, meskipun penetapan calon oleh Partai belum dilakukan namun bacalon Petahan sudah dipastikan akan di usung oleh Partai Nasdem, Nasdem sendiri sejak awal tidak lagi menjaring calon Bupati hanya menjaring untuk calon Wakil Bupati. (Sumber: lampung.tribunnews.com diakses pada hari selasa 10 Maret 2020 pukul 19.07 WIB)

Sedangkan Wakil Bupati Petahana saat ini, yaitu Erlina telah dipastikan akan membentuk poros baru, namun penetapan calon belum muncul karena masih menunggu rekomendasi Partai, Erlina sendiri telah mendaftarkan diri dan mengembalikan berkas dari Partai PKB, PDIP, dan Demokrat. Saat ini Erlina sedang menjalin komunikasi dengan beberapa Partai Politik, namun dirinya optimis mendapatkan rekomendasi dari PKB yang merupakan basis Partai Pendukung Erlina

pada Pilkada sebelumnya. Erlina di pandang sebagai penantang kuat jika kembali di usung oleh PKB, hal tersebut dilatarbelakangi cukup signifikannya jumlah masa yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. (Sumber: radarlampung.co.id diakses pada hari Selasa, 10 Maret 2020 pukul 19.12 WIB)

Tokoh lain yang cukup menarik perhatian yaitu munculnya Pj. Bupati Pesisir Barat tahun 2013 sampai 2015 yaitu Kherlani dalam bursa Calon Bupati Pesisir Bara, saat ini Kherlani masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mejabat sebagai Kepala BPSDM Provinsi Lampung. Kherlani merupakan tokoh birokrat senior di Lampung, dirinya pun menyatakan siap untuk mengundurkan diri sebagai PNS demi dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Pesisir Barat. Nama Kherlani tentu sudah tidak asing lagi di Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, dua tahun menjabat sebagai Pj. Bupati Pesisir Barat sudah cukup dikenal oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dan saat ini Kherlani mengaku sedang berkomunikasi dengan beberapa Partai Politik. (Sumber: medialampung.co.id diakses pada hari Selasa, 10 Maret 2020 pukul 20.00 WIB)

Selain 3 tokoh sebelumnya, nama bakal calon yang muncul kembali dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020 yaitu penantang kuat Petahana pada Pilkada Pesisir Barat sebelumnya yaitu Arya Lukita Budiwan atau sering di sapa ALB. ALB yang merupakan seorang pengusaha menyatakan siap untuk maju kembali dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat, komunikasi Politik sedang dilakukan demi mendapatkan rekomendasi dari Partai. Pada Pilkada Pesisir Barat sebelumnya ALB-Efan mendapatkan suara sebanyak 24.664 dengan persentase 30,71%, atau selisih hanya 1070 suara atau 1,34 % dibandingkan perolehan suara Agus Istiqlal-Erlina sebagai pemenang saat itu sebanyak 25.534 suara atau 32,05%.

Tokoh baru yang kemungkinan besar muncul sebagai Bakal Calon Bupati Pesisir Barat yaitu Peter, meskipun merupakan nama baru dalam bursa Calon Bupati Pesisir Barat 2020 nama Peter cukup dikenal sebagian masyarakat Pesisir Barat. Adapun Peter merupakan Pimpinan salah satu Perusahaan swasta yang sudah cukup lama beroperasi di Kabupaten Pesisir Barat, perusahaan tersebut yaitu PT. Karya Canggih Mandirutama (KCMU) yang bergerak pada sector Perkebunan kelapa sawit. Peter kemungkinan besar akan diusung oleh PDIP, yaitu partai pengusungnya dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019, meskipun pada pemilihan legislative saat itu menuai kegagalan namun tidak menyurutkan niat untuk maju sebagai calon Bupati Pesisir Barat. Komunikasi politik masih terus berlangsung, dan kemungkinan - kemungkinan masih bisa terjadi sampai pada pengumuman atau deklarasi Partai dari Bakal Calon sampai Penetapan Calon Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa kontestasi politik dan persaingan politik akan semakin menarik. Dimana banyaknya kemungkinan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang muncul dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020 yang dilihat dari beberapa latar belakang calon diantaranya yaitu Politisi, Birokrat, dan Pengusaha. Nama-nama lain masih berkemungkinan muncul seperti di antaranya mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir barat yaitu Azhari, tokoh masyarakat (Sai Batin) yaitu Zulqoini Syarif, Politisi Senior yaitu Heri Gunawan, Notaris yaitu Sri Dahliawaty, dan Elty Yunani.

Hal menarik lainnya tentu akan terjadi setelah penetapan calon di umumkan oleh Partai Pengusung dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga formil penyelenggaraan pemilu. Setelah penetapan calon dilakukan maka rangkaian tahapan Pilkada pun masuk pada pelaksanaan kampanye Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati, yang tentu akan melibatkan pihak - pihak relawan dan tim sukses calon dalam upaya menarik simpati masyarakat dan mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya sebagai upaya memenangkan Pilkada. Proses tersebut akan memunculkan hubungan Klientelisme dan Patronase cukup erat dan beragam dimana pertarungan yang terjadi melibatkan actor politik yang mempunyai latar belakang berbeda-beda.

Klientelisme di maksudkan sebagai masyarakat sebagai objek untuk mendulang suara oleh Calon, sedangkan Patronase di maksudkan sebagai actor penghubung antara klien dan calon yaitu berperan sebagai relawan maupun tim sukses Calon. Karakteristik hubungan Patron-Klien akan muncul, seperti misalnya Petahana akan memanfaatkan jabatannya saat ini dengan menghimpun suara dari para pegawai maupun PNS dengan diberikannya jabatan baru atau fasilitas pendukung lainnya, selain itu dengan jabatannya mampu mempengaruhi masyarakat luas dengan mengeluarkan kebijakan yang memberikan nilai lebih bagi dirinya. Contoh lainnya yaitu Calon yang mempunyai latar belakang pengusaha akan menghimpun suara dari relasinya kepada pengusaha-pengusaha lainnya, karyawan, ataupun tokoh masyarakat, begitu pula tokoh politik yang lebih memunculkan sosoknya sebagai tokoh yang layak menjadi pemimpin.

Penelitian ini berfokus pada fenomena dan indikasi Patronase dan Klientelisme dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020. Hal tersebut dianggap menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana fenomena yang terjadi dan indikasi yang akan terjadi dalam Pilkada tersebut. Banyaknya bakal calon yang muncul dari beberapa kalangan seperti Petahana, Pengusaha, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, bahkan Notaris menunjukkan bahwasannya Pilkada Kabupaten Pesisir Barat cukup menarik tokoh - tokoh untuk

bertarung memperebutkan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah proses demokrasi dimana terjadi pergantian kepemimpinan daerah pada tingkat lokal. Sarundajang (2011:117) mengatakan bahwa Pilkada sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pilkada, rakyat akan secara langsung memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah, pilkada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (*legitimate*).

Selanjutnya Suharizal (2011:7) berpendapat secara filosofis munculnya gagasan tentang pilkada secara langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai. Pilkada langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh rakyat.

Patronase

Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, Para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka (Shefter, 1977). Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (misalnya, lapangan

sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung).

Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal *money politics* dan *vote buying*) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang di biayai oleh pemerintah). Dalam literatur Ilmu Politik, *Pork barrel* adalah salah satu bentuk dari politik distributif, dimana politisi (baik lembaga legislatif maupun eksekutif) berusaha untuk mengalokasikan sumber daya material dari negara kepada pendukungnya dalam kerangka mobilisasi dukungan elektoral. Para politisi berusaha mewujudkan program yang konkret kepada konstituennya dalam rangka terpilih kembali di pemilu berikutnya. Dari sisi yang lain, konstituen berusaha mendapatkan program material dari negara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Praktik ini sebenarnya berlangsung di banyak negara, termasuk negara-negara yang demokrasinya sudah mapan.

Pork barrel juga sering disebut sebagai politik distribusi (*distributive politics*) dapat di defnisikan sebagai suatu bentuk penyaluran bantuan materi (sering dalam bentuk kontrak, hibah, atau proyek pekerjaan umum) ke kabupaten/kota dari pejabat terpilih. Secara umum, dapat dikatakan bahwa *pork barrel* berasosiasi dengan proyek-proyek pekerjaan publik seperti proyek perbaikan jalan, perbaikan fasilitas di sekitar sungai, dan perbaikan pelabuhan. Proyekproyek perbaikan fasilitas publik tersebut sering dijadikan contoh klasik *pork barrel* yang disitir dalam banyak literatur kajian politik *pork barrel*. Hal ini bukan berarti bahwa *pork barrel* hanya mencakup proyek-proyek fisik berupa perbaikan fasilitas publik, tetapi *pork barrel* juga dapat mengambil bentuk distribusi kesejahteraan (Stokes, 2013).

Klientelisme

Konsep klientelisme sering ditempatkan dalam posisi yang memiliki arti berbeda dengan patronase (patronage). Konsep patronase didefinisikan sebagai relasi dua arah ketika seorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron

Terdapat beberapa karakter yang memberikan ciri spesifik patronase. Karakteristik tersebut mencakup relasi patron-klien yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara dan bersifat dua arah. Relasi dua arah dapat berubah menjadi relasi tiga arah apabila di dalam suatu komunitas, patron juga berfungsi sebagai Perantara untuk menjembatani relasi klien mereka dengan pihak-pihak lain di luar komunitas mereka. Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang didalamnya mengandung elemen iterasi, status inequality dan resiprokal (Tomsa & Ufen, 2012).

Kemudian, klientelisme juga adalah relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis dan iterasi. Maka dapat dipastikan bahwa klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam kajian politik, klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi kliennya (Aspinall, 2019).

Studi mutakhir Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam buku *Democracy For Sale* hendak menjawab realitas politik klientelisme di Indonesia dengan perbandingan pada kasus India dan Argentina. Tesis buku ini adalah sistem politik yang terdemokratisasi sejak 1998

masih diwarnai klientelisme yang merefleksikan serta mereproduksi struktur ketimpangan sosial dan ekonomi. Penulis berpandangan bahwa bentuk klientelisme di Indonesia adalah klientelisme gelindingan roda lepas sebagai warisan politik birokratik otoritarian dan akibat sampingan dari desain sistem pemilu.

Aspinall dan Berenschot (2019) menggunakan tiga pendekatan untuk menjelaskan klientelisme di Indonesia.

1. Pendekatan kulturalis, didapat dari metode etnografi dan kepekaan terhadap logika dan norma kultural yang membuat orang terlibat dalam pertukaran klientelisme. Pendekatan ini muncul dalam gelombang pertama studi klientelisme dekade 1960-an hingga 1970-an, dan kebanyakan dirintis oleh antropolog yang melihatnya sebagai bentuk khusus relasi sosial.

Suatu hubungan yang terpersonifikasi didasarkan pada loyalitas bersyarat dan transaksi manfaat timbal balik. Pandangan ini mendorong munculnya pemahaman "kulturalis" dengan fokus pada norma sosial dan ide-ide yang berkontribusi dalam membentuk hubungan patron dan klien -- meskipun, pendekatan kultural ini tidak cukup memadai dalam mengidentifikasi perubahan dalam praktik klientelistik.

2. Pendekatan Marketis

Menekankan pada strategi yang memotivasi banyak pilihan politik yang diambil para aktor dalam politik klientelisme. Pendekatan ini muncul dalam gelombang kedua studi klientelisme pada tahun 2000 yang dipacu oleh kesadaran bahwa klientelistik tidak lenyap begitu saja sebagai hasil dari demokratisasi dan modernisasi. Dominasi pendekatan marketis, sepanjang kenyataan bahwa ia menekankan kalkulasi yang dibuat oleh aktor terkait biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang di dapat dalam pertukaran klientelistik. Karenanya perhatian utama disini, mengapa politisi berani

mengeluarkan sejumlah besar uang tanpa ada pengawasan di kotak suara saat pemilihan.

3. Pendekatan Institusionalis

digunakan untuk mengetahui tumbuh berkembangnya klientelisme. Dengan pendekatan ini, Aspinall dan Berenschot menjelaskan dari aspek pembentukan negara (dalam hal ini, Indonesia pasca-Orde Baru) serta menelisik desain kelembagaan seperti apa yang memungkinkan klientelisme berkembang. Mereka berpendapat bahwa penerapan daftar-partai-terbuka atau proporsional terbuka membuat partai tidak lagi memegang peran penting dalam pemilihan. Para calon lebih mengutamakan strategi keluar dengan membentuk tim informal non-partai, ketimbang bergantung pada mesin partai.

Dari tiga pendekatan tersebut, lebih lanjut, Aspinall dan Berenschot menjelaskan konsep klientelisme gelindingan roda lepas melalui empat argumen inti: jejaring partai dan non-partai, pola kontrol berdasar diskresi, hakikat sumber daya, dan intensitas pertukaran klientelistik.

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memahami fenomena social yang mendalam, dengan kekhasan metode kuallitatif diharapkan menjelaskan sesuatu dari pola relasi yang terjadi antara Calon melalui tim sukses kepada masyarakat dalam upaya menghimpun suara, sehingga makna dari fenomena tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah dan sederhana.

Selanjutnya penulis menghimpun data dari beberapa berita online sebagai bahan analisis dasar. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana fenomena dan Indikasi Patronase dan Klientelisme yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 23 September 2020. Pilkada Pesisir Barat cukup menarik para tokoh untuk turut serta berkontestasi untuk memenangkan Pilkada, yang kemungkinan besar akan diikuti oleh tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang diantaranya Petahana, Wakil bupati petahana yang membuat poros baru, Birokrat, Pengusaha, Tokoh Masyarakat, Politisi, bahkan seorang Notaris.

Penulis menganalisis fenomena Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat menggunakan tiga pendekatan menurut Aspinall dan Berenschot diantaranya.

1. Pendekatan Kulturalis

Pendekatan ini menekankan pada kepekaan terhadap logika dan norma kultural yang membuat orang terlibat dalam pertukaran klientelisme. Kabupaten Pesisir Barat Merupakan Daerah yang memilik kultur adat istiadat yang kental, Kabupaten yang berjuluk Bumi Para Sai Batin dan Para Ulama ini merupakan daerah Lampung adat Pesisir yang mempunyai 13 Marga yang tersebar di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Fenomena yang terjadi bahwa Pilkada yang telah dilakukan pada jilid pertama para Calon menggunakan strategi pendekatan Kulturalis sebagai upaya untuk menarik simpati dan meraih dukungan masyarakat. Pendekatan dilakukan melalui ketua-ketua adat pada setiap marga dengan menawarkan program serta menyamakan konsep pembangunan dimasa mendatang, selain itu slogan "Putra Daerah" juga dipromosikan oleh Petahana sebagai bentuk marketing politik dirinya. Pendekatan dan diskusi dilakukan secara intens dan menyeluruh hingga memunculkan kesepahaman konsep dan visi Bersama dan

memajukan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.

Penulis mengindikasikan bahwa hal ini akan kembali terjadi dan dimanfaatkan oleh para calon dalam mengumpulkan dukungan suara. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kentalnya adat istiadat di Kabupaten Pesisir Barat, hubungan Patron dan Klien akan sangat mungkin terjadi dalam melakukan pendekatan pada ketua-ketua adat yang merupakan panutan bagi masyarakat adatnya dan mempunyai kekuatan untuk memobilisasi masyarakat adatnya untuk memberikan dukungan politik.

2. Pendekatan Marketis

Pendekatan ini menekankan pada strategi yang memotivasi banyak pilihan politik yang diambil para aktor dalam politik klientelisme. Kemajemukan masyarakat Pesisir Barat melatarbelakangi Calon untuk juga menggunakan pendekatan marketis dalam memperoleh dukungan, sama halnya dengan marketing politik yaitu menawarkan sebuah program melalui visi dan misi kepada masyarakat melalui pendekatan dan diskusi yang dilakukan secara menyeluruh.

Melalui pendekatan marketis tentunya penulis juga mengindikasikan bahwasanya marketing politik tentu akan terjadi pada Pilkada yang akan dilakukan tahun ini, dimana pemasaran politik sebagai upaya untuk menawarkan sebuah program pembangunan 5 tahun kepemimpinan nantinya. Dialog dan kampanye lainnya akan dilakukan oleh calon demi menyamakan dan mengenalkan visi dan misi dengan semenarik dan seefektif mungkin.

3. Pendekatan Institusionalis

Pendekatan ini menekankan pada hubungan yang terjadi pada institusi-institusi atau lembaga masyarakat. Di Kabupaten Pesisir Barat sendiri tidak sedikit lembaga atau organisasi masyarakat

, organisasi masyarakat tersebut tidak hanya sebagai pengawas jalannya pemerintahan namun juga pada saat gelaran Pilkada menjadi kekuatan politik yang cukup efektif. Selama ini lembaga-lembaga masyarakat tersebut secara aktif turut dalam kontestasi politik dengan melakukan diskusi dengan Calon dengan maksud untuk melakukan hubungan saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.

Cukup banyaknya lembaga-lembaga dalam masyarakat tentunya akan dimanfaatkan kembali oleh para calon untuk meraih dukungan politik. Pendekatan-pendekatan akan dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dan membangun hubungan saling menguntungkan, dimana lembaga-lembaga masyarakat mempunyai basis suara untuk memilih sedangkan calon mempunyai sumberdaya materil maupun non materil yang kemudian akan ditawarkan kepada lembaga-lembaga dalam masyarakat tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Fenomena dan Indikasi Patronase dan Klientelisme Pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 adalah :

1. Pendekatan Kulturalis

Pendekatan dilakukan oleh Calon kepada Ketua-Ketua adat di Kabupaten suara, karena dianggap mempunyai pengaruh di masyarakat dan salah satunya mampu memobilisasi masyarakat adatnya untuk memberikan dukungan dan suaranya pada Calon.

2. Pendekatan Marketis

Pendekatan dilakukan oleh Calon dengan menawarkan program-program dan menyatukan visi dengan masyarakat secara luas dan efektif sehingga menarik

simpati masyarakat sehingga memilihnya dalam Pilkada.

lampung.tribunnews.com
radarlampung.co.id
medialampung.co.id

3. Pendekatan Institusionalis

Pendekatan dilakukan dilakukan Calon kepada institusi/lembaga/organisasi dalam masyarakat yang mempunyai basis suara dengan menjalin hubungan saling menguntungkan diantara keduanya.

REFERENSI

- Aspinall, dan Mada Sukmajanti. 2015. *Politik uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme Pemilu 2014*. Yogyakarta. Departemen Polgov UGM
- Berenscot, Edward Aspinall. 2019. *Democracy For Sale : Pemilu, Klientelisme dan Negara Indonesia*. Jakarta: Yayasan obor Pustaka Indonesia
- Dirk Tomsa dan Ufen. 2013. *Party Politics in southest asia Clientelism and electoral competition in Indonesia, Thailand, and Philiphines*. New York. Routledge
- Efriza. 2012. *Political Explore*. Bandung: Alfabeta.
- Sarundajang. 2012. *Pilkada Langsung : problematika dan prospek*. Edisi Revisi. Kata Hasta Pustaka
- Stokes, Jane. 2013. *Panduan untuk melaksanakan penelitian dalam kajian media dan Budaya*. Bentang Pustaka. Yogyakarta
- Suharizal. 2012. *Pemilukada*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal :

- Aji Pratama, Rekha. 2017. *Patronase dan Klientelisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017*. Jurnal Wacana Politik Vol.2 No.1
- Chalid, Abdul. 2017. *Politik Patronase di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*. Jurnal The Politic Vol.3 No.1
- Anggoro, Teguh. 2019. berjudul “Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan TNI dalam Pemilu Legislatif. Vol.4 No.1

Website:

Kpupesirbarat.blogspot.com